

**PENGARUH BELANJA PEGAWAI, PENDAPATAN ASLI DAERAH
(PAD) DAN DANA ALOKASI UMUM (DAU) TERHADAP
INVESTASI PEMERINTAH DAERAH PADA
KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI
SUMATERA SELATAN**



Skripsi Oleh :

BENDI AGUSTIANTO

01091003107

Akuntansi

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Meraih
Gelar Sarjana Ekonomi*

KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS EKONOMI

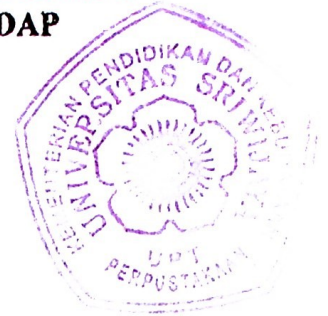
2013

S
352.407
Ben
P
e/1 → 131946
2013

R 21101
21565

e/1

**PENGARUH BELANJA PEGAWAI, PENDAPATAN ASLI DAERAH
(PAD) DAN DANA ALOKASI UMUM (DAU) TERHADAP
INVESTASI PEMERINTAH DAERAH PADA
KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI
SUMATERA SELATAN**



Skripsi Oleh :

BENDI AGUSTIANTO
01091003107
Akuntansi

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Meraih
Gelar Sarjana Ekonomi*

KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS EKONOMI

2013

LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN KOMPREHENSIF

PENGARUH BELANJA PEGAWAI, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD),
DAN DANA ALOKASI UMUM (DAU) TERHADAP INVESTASI
PEMERINTAH DAERAH PADA KABUPATEN/KOTA
DI PROVINSI SUMATERA SELATAN

Disusun oleh :


Nama Mahasiswa : Bendi Agustianto
NIM : 010910030107
Fakultas : Ekonomi
Jurusan : Akuntansi
Bidang Kajian/Konsentrasi : Akuntansi Sektor Publik

Disetujui untuk digunakan dalam ujian komprehensif


Tanggal Persetujuan

Dosen Pembimbing

Tanggal : 22 Juli 2013

Ketua : 
Hj. Rochmawati Daud, S.E., M.Si., Ak.
NIP 196409031994032001

Tanggal : 2 Juli 2013

Anggota : 
Ika Sasti Ferina, S.E., M.Si., Ak.
NIP 197802102001122001

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

PENGARUH BELANJA PEGAWAI, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAN DANA ALOKASI UMUM (DAU) TERHADAP INVESTASI PEMERINTAH DAERAH PADA KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI SUMATERA SELATAN

Disusun Oleh :

Nama : Bendi Agustianto
NIM : 01091003107
Fakultas : Ekonomi
Jurusan : Akuntansi
Bidang Kajian/Konsentrasi : Akuntansi Sektor Publik

Telah diuji dalam ujian komprehensif pada tanggal 9 September 2013 dan telah memenuhi syarat untuk diterima.

Panitia Ujian Komprehensif
Inderalaya, 9 September 2013

Ketua ,



Hj. Rochmawati Daud, S.E., M.Si., Ak.
NIP. 196409031994032001

Anggota,



Ika Sasti Ferina, S.E., M.Si., Ak.
NIP. 197802102001122001

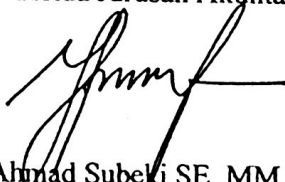
Anggota,



Aryanto, SE., M.TI, Ak.
NIP. 197408142001121003

Mengetahui,

Ketua Jurusan Akuntansi



Ahmad Subeki SE, MM, Ak
NIP. 196508161995121001

SURAT PERNYATAAN INTEGRITAS KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Bendi Agustianto
NIM : 01091003107
Jurusan : Akuntansi
Bidang Kajian : Akuntansi Sektor Publik
Fakultas : Ekonomi

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi yang berjudul :
Pengaruh Belanja Pegawai, Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan Dana Alokasi
Umum terhadap Investasi Pemerintah Daerah pada Kabupaten/Kota di Sumatera
Selatan

Pembimbing :

Ketua : Hj. Rochmawati Daud, S.E., M.Si., Ak.

Anggota : Ika Sasti Ferina, S.E., M.Si., Ak.

Tanggal Ujian : 9 September 2013

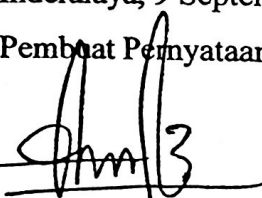
adalah benar hasil karya Saya sendiri. Dalam skripsi ini tidak ada kutipan hasil
karya orang lain yang tidak disebutkan sumbernya.

Demikianlah pernyataan ini Saya buat dengan sebenarnya, dan apabila pernyataan
Saya ini tidak benar dikemudian hari, Saya bersedia dicabut predikat kelulusan
dan gelar kesarjanaaan.

Inderalaya, 9 September 2013

Pembuat Pernyataan,




Bendi Agustianto
NIM. 01091003107

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan penelitian dan skripsi yang berjudul **“Pengaruh Belanja Pegawai, Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Investasi Pemerintah Daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan”**. Skripsi ini dibuat untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan dalam meraih derajat sarjana Ekonomi program Strata Satu (S-1) Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya.

Skripsi ini membahas mengenai sejauh mana belanja pegawai, PAD, dan DAU mempengaruhi investasi pemerintah daerah. Selama penelitian dan penyusunan skripsi ini, penulis tidak luput dari berbagai kendala. Kendala tersebut dapat diatasi berkat bantuan, bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak. Penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada:

1. Ibu Hj Rochmawati Daud, SE., M.Si., Ak. selaku pembimbing I dan Ibu Ika Sasti Ferina, SE., M.Si., Ak. selaku Pembimbing II yang telah mengorbankan waktu, tenaga, pikiran untuk membimbing serta memberikan saran dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak Ahmad Subeki, S.E., M.M., Ak. selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya.
3. Bapak Mukhtaruddin, S.E., M.Si., Ak. selaku Sekretaris Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya.
4. Bapak/Ibu dosen penguji yang telah membantu memberikan kritik dan saran.
5. Keluarga saya; Bapak, Ibu, Kakak dan Adik yang senantiasa mendukung dan mendoakan saya agar skripsi ini bisa terselesaikan dengan baik.
6. Teman satu angkatan FE Unsri Akuntansi 2009 yang selalu memberikan kritik, saran, dukungan, bantuan, dan doa dalam hal pembuatan skripsi saya.
7. Teman berbagi suka dan duka : Desy Amelia Purwani, Regina Fitriafrishanti, Fadillah Indriani, Marzuki, Herpin Nugraha, Dwi mulia, Dodi Irawan, Amrina Rosyada, Dian Yunia Ningsih, Dwi Gian Sari, Terry Ariestia, Danti

Sagita, yang senantiasa selalu bersama, memberikan kritik dan saran, membantu dan mendoakan hingga skripsi ini bisa terselesaikan.

8. Teman-teman gerbong lokomotif yang selalu memberikan dukungan terutama Amalia Returini, Nenek Verlly, dan untuk Puyang Mamat serta David terimakasih tumpangan kosnya.
9. Dan teman-teman lain yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu disini. Terima kasih karena telah membantu memberikan dukungan dan doa hingga skripsi ini bisa selesai.

Penulis sadar bahwa di dalam penelitian dan penulisan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan, oleh karena itu penulis berharap kritik juga saran dari segala pihak agar skripsi ini bisa lebih baik.

Indralaya, 9 September 2013



Bendi Agustianto

Penulis

ABSTRAK

PENGARUH BELANJA PEGAWAI, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAN DANA ALOKASI UMUM (DAU) TERHADAP INVESTASI PEMERINTAH DAERAH PADA KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI SUMATERA SELATAN

Oleh:

Bendi Agustianto

Penelitian ini bertujuan untuk melihat sejauh mana pengaruh belanja pegawai, pendapatan asli daerah (PAD), dan dana alokasi umum (DAU) terhadap investasi pemerintah yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh kabupaten/kota yang ada di Provinsi Sumatera Selatan. Penentuan sampel menggunakan metode *purposive sampling*. Penelitian menggunakan sampel sebanyak enam kabupaten dan satu kota. Jumlah data dalam penelitian ini sebanyak 35 data. Data penelitian ini merupakan data skunder yang berasal dari laporan realisasi anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) kabupaten/kota dalam kurun waktu lima tahun dari 2007 sampai dengan 2011. Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan regresi linier berganda dengan uji t, uji F, dan koefisien determinasi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa belanja pegawai, pendapatan asli daerah (PAD), dan dana alokasi umum (DAU) secara simultan (Uji F) berpengaruh terhadap investasi pemerintah, sementara secara parsial (Uji t) belanja pegawai tidak memiliki pengaruh. Variabel pendapatan asli daerah (PAD) dan dana alokasi umum (DAU) secara parsial memiliki pengaruh yang signifikan. Dengan koefisien determinasi sebesar 55,2%.

Kata kunci: *Belanja Pegawai, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Investasi Pemerintah*

ABSTRACT

THE INFLUENCE OF OFFICER SALARIES, REGIONAL REVENUES, AND PUBLIC FUNDS AND THE REGIONAL GOVERNMENT'S INVESTMENTS IN COUNTIES/ADMINISTRATIVE CITIES OF SOUTH SUMATERA PROVINCE

By:

Bendi Agustianto ; Hj. Rochmawati Daud , SE., M.Si., Ak., Ika Sasti Ferina, SE.,
M.Si., Ak.

*This research is aimed at identifying the influence of officer's salaries, regional revenues, and public fund and the regional government's investment in counties/administrative cities of South Sumatera Province. The population is all the counties and administrative cities in the province. The sample is selected by the purposive sampling technique. It consists of six counties and one administrative city. Thirty five sets of secondary data are collected. They are retrieved from reports of revenues collected by the regional governments in 2007 to 2011. This research uses multiple linear regression analysis taking the *t* and *F* tests, and determinant coefficient, and show that the three factor simultaneously influence the government's investment (by the *F* test). The *t* test shows that the regional revenues and public fund have a significant influence on the investment as shown by the determinant coefficient value of 55,2%*

Keywords: *officer's salaries, regional revenues, public fund, government's investment*

RIWAYAT HIDUP

Nama Mahasiswa : Bendi Agustianto
Jenis Kelamin : Laki-laki
Tempat/TglLahir : Gunung Meraksa Lama / 10 Agustus 1991
Agama : Islam
Status : Belum Menikah
Alamat Rumah : Jalan Lintas Pendopo-Pagaralam Desa Gunung Meraksa
Lama, Kecamatan Pendopo, Kabupaten Empat Lawang
31593
Alamat E-mail : Benagustianto@gmail.com

Pendidikan Formal :

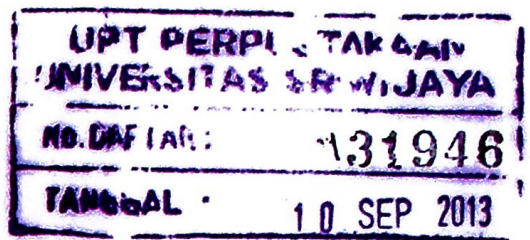
1. SD Negeri 4 Pendopo (1997-2003)
2. SMP Negeri 3 Pendopo (2003-2006)
3. SMA Negeri 4 Lahat (2006-2009)

Pendidikan Non Formal :

2. Budi Wijaya English Course Indralaya (2010)

Pengalaman Organisasi :

1. Anggota Ikatan Mahasiswa Akuntansi Universitas Sriwijaya (2011)
2. Anggota Divisi Kerohanian Ikatan Mahasiswa Akuntansi Unsri (2012)
3. Anggota



DAFTAR ISI

	Halaman
SAMPUL DALAM	i
HALAMAN PERSETUJUAN UJIAN KOMPREHENSIF	ii
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PERNYATAAN INTEGRITAS KARYA ILMIAH	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK.....	vii
ABSTRACT	viii
RIWAYAT HIDUP	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Perumusan Masalah	6
1.3. Tujuan Penelitian	6
1.4. Manfaat Penelitian.....	6
1.5. Sistematika Penulisan.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	8
2.1. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah	8
2.1.1. Fungsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	9
2.1.2. Sumber Anggaran Pendapatan Belanja Daerah	10
2.2. Keuangan daerah	12

2.2.1. Penerimaan Daerah	13
2.2.2. Pendapatan Asli Daerah (PAD)	13
2.2.3. Pengeluaran Daerah	19
2.2.4. Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah	23
2.2.4.1 Dana Bagi Hasil	23
2.2.4.2 Dana Alokasi Umum (DAU)	24
2.2.4.3 Dana Alokasi Khusus (DAK)	25
2.3. Investasi Pemerintah	26
2.3.1 Bentuk Investasi Pemerintah Daerah	27
2.4. Penelitian Terdahulu	29
2.5. Kerangka Pemikiran	31
2.6. Hipotesis	31
BAB III METODE PENELITIAN	32
3.1. Ruang Lingkup Penelitian	32
3.2. Jenis dan Sumber Data	32
3.3. Populasi dan Sampel	33
3.4. Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel	33
3.4.1. Variabel Independen	33
3.4.2. Variabel Dependen	34
3.5. Teknik Analisis	34
3.5.1. Analisis Statistik Deskriptif	35
3.5.2. Uji Asumsi Klasik	35
3.5.2.1. Uji Normalitas	35
3.5.1.2. Uji Multikolinieritas	35
3.5.2.3. Uji Heteroskedastisitas	36
3.5.2.4. Uji Autokorelasi	37

3.5.3. Analisis Regresi.....	37
3.5.4. Uji F	39
3.5.5. Uji t	39
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	40
4.1. Deskripsi Objek Penelitian	40
4.2. Hasil Analisis Data	41
4.2.1. Hasil Analisis Statistik Deskriptif.....	41
4.2.2. Uji Asumsi Klasik	46
4.2.2.1. Uji Normalitas	46
4.2.2.2. Uji Multikolinearitas	48
4.2.2.3. Uji Heteroskedastisitas.....	49
4.2.2.4. Uji Autokorelasi	51
4.2.3. Uji Hipotesis dengan Regresi Linear Berganda	52
4.2.3.1. Koefisien Determinasi	53
4.2.3.2. Uji F.....	54
4.2.3.3. Uji t	55
4.2.4. Hasil Estimasi Model Regresi	57
4.2.5. Hasil Uji Hipotesis	59
4.3. Pembahasan	60
4.3.1. Pengaruh belanja pegawai, PAD, dan DAU secara simultan	61
4.3.2. Pengaruh Belanja Pegawai terhadap Investasi Pemerintah.	63
4.3.3 Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Investasi Pemerintah....	65
4.3.4. Pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Investasi Pemerintah.....	67

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	70
5.1. Kesimpulan	70
5.2. Keterbatasan Penelitian	71
5.3. Saran.....	72
5.4. Implikasi	72
Daftar Pustaka	

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1. Belanja Pegawai Dalam APBD 2011	5
Tabel 3.1. Durbin Watson	37
Tabel 4.1. Hasil Penentuan Sampel	40
Tabel 4.2. Daftar kabupaten/kota yang menjadi sampel penelitian.....	41
Tabel 4.3. Hasil Uji Statistik Deskriptif.....	42
Tabel 4.4. Hasil Uji Normalitas KS.....	45
Tabel 4.5. Hasil Uji Multikolinearitas	46
Tabel 4.6. Hasil Uji Heteroskedastisitas.....	47
Tabel 4.7. Hasil Uji Autokorelasi.....	48
Tabel 4.8 Koefisien Determinasi.....	50
Tabel 4.9 Hasil uji statistik F.....	52
Tabel 4.10 Hasil uji statistik t.....	53
Tabel 4.11 Hasil Etimasi Model Regresi.....	54
Tabel 4.12 Tabel Keputusan.....	56

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1.1. Grafik Persentase Pengeluaran Pembiayaan	4
Gambar 2.1. Kerangka Pemikiran	31
Gambar 4.1. Grafik Investasi Pemerintah	42
Gambar 4.2. Grafik Belanja Pegawai	43
Gambar 4.3. Grafik Pendapatan Asli Daerah	44
Gambar 4.4. Grafik Dana Alokasi Umum.....	45
Gambar 4.5. Grafik Hasil Uji Normalitas	47

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Belanja Pegawai 2007-2011
- Lampiran 2 Pendapatan Asli Daerah 2007-2011
- Lampiran 3 Dana Alokasi Umum 2007-2011
- Lampiran 4 Investasi Pemerintah 2007-2011
- Lampiran 5 Data
- Lampiran 6 Hasil Analisis Statistik Deskriptif
- Lampiran 7 Hasil Uji Normalitas
- Lampiran 8 Hasil Uji Multikolinearitas
- Lampiran 9 Hasil Uji Heteroskedastisitas
- Lampiran 10 Hasil Uji Autokorelasi
- Lampiran 11 Koefisien Determinasi
- Lampiran 12 Hasil Uji F
- Lampiran 13 Hasil Uji t

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang otonomi daerah, pemerintah daerah menjadi titik sentral dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dengan mengedepankan otonomi luas, nyata dan bertanggung jawab. Undang-undang ini juga menjadi undang-undang yang pertama yang menjadikan daerah menjadi pusat atau desentralisasi. Desentralisasi ini menjadikan Pemerintah Daerah berhak dan kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan menurut asas Otonomi dan Tugas Pembantuan, sebagaimana telah diatur pula dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan terakhir Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 yang keduanya merupakan revisi dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999.

Adanya otonomi daerah ini diharapkan adanya kehidupan politik yang lebih demokratis, pemerataan dan keadilan serta menjadikan daerah dapat menggali potensi yang dimiliki, karena selama ini semuanya terpusat pada pemerintah pusat atau sentralisasi. Sebuah kebijakan baru tentunya akan berdampak terhadap sistem yang selama ini ada, seperti yang selama ini pemerintah pusat sepenuhnya mengatur keuangan maka dalam otonomi, Pemerintah Daerah diberikan kewenangan untuk mengatur anggaran rumah tangganya sendiri yang telah dijamin oleh undang-undang.



Bentuk dari kewenangan pemerintah daerah terhadap rumah tangganya sendiri dapat dilihat dari penetapan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) yang dibentuk dari pendapatan asli daerah dan dana perimbangan serta pendapatan lainnya yang sah. Penetapan ini termasuk juga pengalokasian APBD ke pos-pos belanja dan pembiayaan.

Dalam pos pembiayaan dalam APBD terdapat salah satu komponen yaitu penyertaan modal (investasi) daerah yang menurut Prasetyo (2010) adalah untuk memperoleh manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya, sedangkan dana yang dialokasikan untuk melakukan investasi ini dibentuk dari pendapatan asli daerah (PAD) dan dana perimbangan seperti dana alokasi umum (DAU), namun pengalokasian investasi pemerintah ini dibarengi juga dengan membengkaknya belanja pegawai yang untuk Sumatera Selatan sendiri menurut (Handayani, 2013) Belanja Pegawai Secara nominal setiap tahunnya pendapatan daerah Propinsi Sumatera Selatan selalu mengalami peningkatan tetapi sayangnya justru dana perimbangan turun sebesar 5% dan PAD turun secara drastis (9%), dan anggaran publik semakin tergerus untuk membiayai operasional dan belanja pegawai, yang sedikit banyak akan berpengaruh pula terhadap dan pengalokasian untuk melakukan investasi.

Pendapatan asli daerah dan dana perimbangan dalam hal ini dana alokasi umum (DAU) merupakan komponen terbesar pembentuk APBD sehingga semua bentuk belanja dan pembiayaan dibiayai oleh dua sumber ini termasuk investasi yang dilakukan oleh daerah itu artinya besarnya nilai investasi sedikit banyak bersinggungan dengan PAD dan DAU, namun menurut Kartilla (2012)

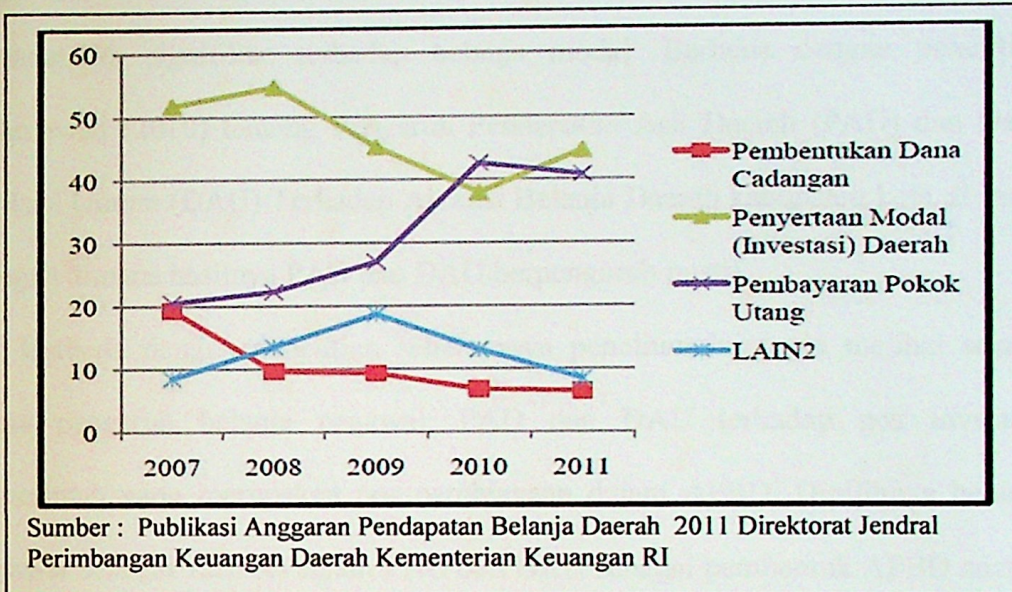
pemerintah daerah boleh saja melakukan investasi sepanjang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)-nya diprediksi surplus. Ketentuan ini tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No.52 tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) yang dikeluarkan ini tampaknya diterbitkan untuk memperketat aturan terkait investasi yang dilakukan pemda. Pemda lebih dulu harus memenuhi kewajibannya untuk melayani masyarakat dan membangun daerah melalui APBD. Setelah kewajiban itu dipenuhi, baru pemda bisa merencanakan untuk berinvestasi. Tidak seperti sebelumnya, pemda boleh merencanakan investasi tanpa memperkirakan APBD yang dikelolanya.

Menurut aturan tersebut, apabila APBD diperkirakan surplus saat pembahasan Rencana Kerja Anggaran (RKA), maka rencana investasi pemda akan disetujui dengan membuat perencanaan dan kajian investasi. Sebaliknya, apabila pada pembahasan RKA APBD dinyatakan defisit, maka pemda harus membatalkan rencana investasi apapun. Investasi yang dilakukan pemda sebenarnya tidak bertujuan untuk mengambil keuntungan secara bisnis, namun guna penyediaan pelayanan bagi masyarakat.

Peraturan ini sendiri mengindikasikan bahwa banyak pemerintah daerah melakukan investasi namun tidak memperkirakan APBD yang dikelolanya. Sementara sebelum peraturan tersebut berlaku, menurut rangkuman Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Republik Indonesia. Di Indonesia pengeluaran pembiayaan utamanya dialokasikan untuk penyertaan modal (investasi) daerah

sebesar 44% (Rp 3,4 Triliun) dan Pembayaran pokok utang 41% (Rp 3,1 Triliun) pada tahun 2011.

Gambar 1.1 Grafik Persentase Pengeluaran Pembiayaan



Sedang tahun 2008 investasi pemerintah daerah meningkat dari tahun 2007 dan turun pada tahun 2009 dan 2010 dan naik kembali pada tahun 2011. Untuk kabupaten/kota di Sumatera Selatan sendiri dalam kurun waktu 2007-2011 ada tujuh kabupaten/kota yang secara rutin melakukan investasi dengan nilai milyaran rupiah dengan APBD lebih banyak dibentuk dari DAU daripada PAD dengan dibarengi nilai belanja pegawai yang tinggi pula. Sementara Sehingga tidak menutup kemungkinan besarnya investasi pemerintah ini sedikit banyak dipengaruhi oleh belanja pegawai, PAD dan DAU

Penelitian tentang pengaruh PAD dan DAU terhadap pengeluaran pemerintah seperti belanja daerah secara keseluruhan maupun belanja modal telah banyak dilakukan. Diantaranya Wandira (2012) yang meneliti pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan

Dana Bagi Hasil (DBH) terhadap Pengalokasian Belanja Modal yang hasilnya Hasil penelitian menunjukkan bahwa DAU dengan arah negatif, DAK dan DBH berpengaruh signifikan terhadap belanja modal, sedangkan PAD tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja modal. Berbeda dengan penelitian Rahmawati (2010) tentang Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) Terhadap Alokasi Belanja Daerah kabupaten kota di Jawa Tengah dimana hasilnya PAD dan DAU berpengaruh positif

Berbeda dengan penelitian sebelumnya penelitian ini ingin melihat sejauh mana pengaruh belanja pegawai, PAD dan DAU terhadap pos investasi pemerintah yang merupakan pos pembiayaan dalam APBD. Dipilihnya belanja pegawai sebagai variabel selain PAD dan DAU sebagai pembentuk APBD adalah karena pos belanja pegawai adalah pos yang memiliki nilai alokasi dana besar seperti yang terlihat dalam publikasi APBD 2011 dari kementerian keuangan yang kemungkinan akan mempengaruhi alokasi untuk investasi.

Tabel 1.1 Belanja pegawai dalam APBD 2011 (dalam miliar)

	2007	2008	2009	2010	2011
Pendapatan	285,275	376,434	387,164	403,041	442,235
Belanja	312,701	366,951	353,300	443,565	474,135
- Belanja pegawai	111,795	141,971	161,904	174,762	251,461

Sumber : Publikasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah 2011 Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan Daerah Kementerian Keuangan RI

Dari uraian di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **Pengaruh Belanja Pegawai, Pendapatan Asli Daerah, dan Dana Alokasi Umum terhadap Investasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan.**

1.5 Sistematika penulisan skripsi

Suatu penelitian yang baik haruslah memiliki sistematika penulisan yang baik. Adapun sistematika penulisan penelitian ini dibagi menjadi lima bab, yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini merupakan pendahuluan, dimana dalam bab ini akan dijelaskan tentang latar belakang penelitian, perumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan Pustaka yang menguraikan teori-teori yang terkait dengan topik penelitian, penelitian terdahulu berkaitan dengan masalah yang diteliti dan kerangka pemikiran serta hipotesis penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan mengenai ruang lingkup penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, definisi operasional dan pengukuran variabel, serta metode analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan berisi hasil dan Pembahasan yang menjelaskan tentang analisis terhadap data dan beberapa pengujian yang dilakukan serta temuan empiris yang diperoleh.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan tentang hasil penelitian, diuraikan pula tentang keterbatasan penelitian serta saran-saran yang berguna untuk penelitian selanjutnya.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana Pengaruh Belanja Pegawai, PAD dan DAU terhadap Investasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan.

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa besar pengaruh Pengaruh Belanja Pegawai, PAD dan DAU terhadap Investasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan.

1.4 Manfaat Penelitian

Ada pun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menanbah pengetahuan seberapa besar pengaruh Pengaruh Belanja Pegawai, PAD dan DAU terhadap Investasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan.
2. Sebagai bahan literatur untuk penelitian mahasiswa jurusan akuntansi dimasa mendatang.
3. Untuk bahan masukan bagi kabupaten/kota di Sumatera Selatan dalam melakukan kebijakan dalam keuangan dan pendapatan daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Aini, Syarifah Arieva. 2013. *Belanja Daerah, Proyeksi Dan Klasifikasinya*
Diambil pada tanggal 7 Juni dari
<http://ainiarie2012.blogspot.com/2013/02/belanja-daerah-proyeksi-dan.html>
- Bastian, Indra, 2010. *Akuntansi Sektor Publik Suatu Pengantar*, Edisi Ketiga,
Jakarta: Penerbit Erlangga
- B P, Kesit. 2004. Analisis Pengaruh Dana Alokasi Umum(DAU) dan Pendapatan Asli Daerah(PAD) terhadap Prediksi Belanja Daerah (Studi Empirik di Wilayah Propinsi Jawa Tengah dan DIY)
- Bratakusumah, Dedy Supriyadi dan Dadang Solihin. 2001. *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Daerah Kementerian Keuangan. 2013. *Data Series setelah TA 2006* diambil pada tanggal 7 Juni 2013 dari
<http://www.djpk.depkeu.go.id/data-series/data-keuangan-daerah>
- Djumena, Erlangga. 2011. *Pemerintah Akan Batasi Anggaran Belanja Pegawai Daerah*
Diambil tanggal 1 Juli 2013 dari
<http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2011/06/23/09220299/Pemerintah.Akan.Batasi.Anggaran.Belanja.Pegawai.Daerah>
- Fritzado. 2010. *Koefisien Determinasi (R²) & Uji F* Diambil pada tanggal 20 Juni dari
<http://frisztado.wordpress.com/2010/11/05/koefisien-determinasi-r2-uji-f/>
- Ghozali, Imam. 2005. *Analisis multivariate dengan program SPSS*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro
- Halim, Abdul. 2007. *Akuntansi Sektor Publik : Akuntansi Keuangan Daerah*. Edisi 3. Salemba 4 : Jakarta
- Handayani. 2013. *Evaluasi Kebijakan Pemprov Sumatera Selatan per 2008 – 2012* : Jurnalindenpeden.com
- Janie, Dyah Nurmala Arum. 2012. *Statistik Deskriptif & Regresi Linier Berganda Dengan Spss*. Semarang : Semarang University Press

- Kartilla, Illa. 2012. *Investasi Diizinkan Jika APBD Surplus* Diambil tanggal 9 April 2013 dari <http://hariansinggalang.co.id/investasi-diizinkan-jika-apbd-surplus/>
- Kementerian keuangan RI . 2012. Publikasi Anggaran Belanja Daerah 2011
- Mohammad, Jimmi Ibrahim. 1991. *Prospek Otonomi Daerah*. Semarang : Dahara Prize.
- Nurlela dan Islahudin. 2008. Pengaruh *Corporate Social Responsibility* terhadap Nilai Perusahaan dengan Prosentase Kepemilikan Manajemen sebagai Variabel Moderating. *Simposium Nasional Akuntansi X*
- Prasetyo, Riris. 2010. *Investasi Pemerintah Daerah* diambil tanggal 9 April 2013 dari <http://asetdaerah.wordpress.com/2010/11/22/investasi-pemerintah-daerah/>
- Permanasari, Wien Ika. 2010. Pengaruh Kepemilikan Manajemen, Kepemilikan Institusional, dan *Corporate Social Responsibility* terhadap Nilai Perusahaan, *Skripsi* Fakultas Ekonomi. Universitas Diponegoro Semarang
- Republik Indonesia. 2005. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Republik Indonesia. 2004. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
- Republik Indonesia, UU No. 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah.
- Republik Indonesia. Undang-Undang No 28 Tahun 2009 tentang Pendapatan Asli Daerah
- Republik Indonesia. 2004. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
- Rahmawati, Nur Indah. 2010. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) Terhadap Alokasi Belanja Daerah kabupaten kota di JawaTengah. *Skripsi*, Universitas Diponegoro, Semarang.
- Siswanto, Kusnandar Dodik. __. Pengaruh Dana Alokasi Umum, Pendapatan Asli Daerah, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Dan Luas Wilayah Terhadap Belanja Modal. Universitas Indonesia, Depok

- Syafa'at, Muhtar. 2012. *Penelitian Kuantitas Korelasional* diambil pada tanggal 7 Juni 2013 dari <http://pengembara9ilmu.blogspot.com/2012/09/penelitian-kuantitas-korelasional.html>
- Suparmoko. 2005. *Ekonomi Publik Untuk Keuangan dan Pembangunan Daerah*. Yogyakarta: ANDI
- Suparmoko. 2002. *Ekonomi Publik*. Yogyakarta: ANDI.
- Solihin, Ikin. 2009. *Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum dengan Belanja Modal di Jawa Barat*.
- Tuasikal, Askam*. 2008. Pengaruh DAU, DAK, PAD, dan PDRB Terhadap Belanja Modal Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Di Indonesia Jurnal Telaah & Riset Akuntansi Vol. 1, No. 2. Juli 2008 Hal.142-155
- Ummah, M Bassirun Al. 2009. *Jenis – jenis Penelitian*. Diambil pada tanggal 7 Juni 2013 dari <http://basirunjenispel.blogspot.com/>.
- Wandira, Arbie Gugus. 2012. *Pengaruh PAD, DAU, DAK, dan DBH Terhadap Pengalokasian Belanja Modal*. Accounting Analysis Journal : Universitas Negeri Semarang
- Wibowo, Agung Edy. 2012. *Aplikasi Praktis Spss dalam Penelitian*. Penerbit Gava Media. Yogyakarta